

## STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KOTA PADANG DALAM MEMINIMALISIR *INFODEMIC* VAKSINASI COVID-19

Rahmadhona Fitri Helmi<sup>1</sup>, Pratiwi Nurhabibie<sup>2</sup>, Yuliarti<sup>3</sup>, Yulia Hanoselina<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

Correspondence Email : rahmadhonafh@fis.unp.ac.id

### ABSTRACT

*Currently, the dissemination of information looks pretty excessive in the pandemic Covid-19; it is called an infodemic. As stated by WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus, "...infodemic...spreads faster and more easily than virus Covid-19". Infodemic is information overload and cannot be traced to the truth, especially those circulating and developing during a health emergency. The percentage of vaccination refusal in Padang is relatively high, namely 11,2%, compared to the national rate, which is 5,2%. This requires the Government's communication strategy to provide valid information so that people are willing to be vaccinated. The study aims to analyze the communication strategy carried out by Padang Government in minimizing the Covid-19 vaccine infodemic. This study used a descriptive method with a qualitative approach—informants were withdrawn by purposive sampling. Collects data using observation techniques, interviews, and documentation studies. The results reveal that Padang Government's communication strategy in handling the Covid-19 vaccine infodemic is quite complete, clear, concise, and accurate. However, the substance of the information submitted has not conveyed in detail the safety and halalness of the Covid-19 vaccine. The Padang Government should involve the MUI of West Sumatra in answering public doubts about the Covid-19 vaccine.*

**Keyword:** Government Communication; Infodemic; Covid-19 Vaccination

### ABSTRAK

Pada masa pandemi Covid-19 saat ini, penyebaran informasi terkesan sangat berlebihan, yang diistilahkan dengan infodemik. Seperti diungkapkan oleh Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, "...infodemic...spreads faster and more easily than this virus". Infodemik adalah informasi berlebihan dan tidak dapat ditelusuri kebenarannya, terutama yang beredar dan berkembang pada saat kedaruratan kesehatan. Berdasarkan hasil survei Kompas, persentase penolakan vaksinasi di Kota Padang masih relatif tinggi yaitu 11,2%, dibandingkan persentase nasional, yaitu 5,2%. Hal ini membutuhkan strategi komunikasi Pemerintah untuk memberikan informasi yang valid, sehingga masyarakat bersedia untuk divaksinasi. Penelitian bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang (Diskominfo Kota Padang) dalam meminimalisir infodemik vaksin Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif—penarikan informan dilakukan secara purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil kajian mengungkapkan strategi komunikasi Pemerintah Kota Padang dalam penanganan infodemik vaksin Covid-19 cukup lengkap, jelas, ringkas, dan akurat. Namun, substansi informasi yang disampaikan masih belum menyampaikan secara rinci keamanan dan kehalalan vaksin Covid-19. Pemerintah Kota Padang sebaiknya melibatkan MUI Sumatera Barat dalam menjawab keraguan masyarakat terhadap vaksin Covid-19.

**Kata Kunci:** Komunikasi Pemerintah, Infodemik, Vaksinasi Covid-19.

## PENDAHULUAN

Pada situasi pandemi saat ini, Indonesia telah memasuki tahapan penting dari penanganan Covid-19, yaitu tahap vaksinasi. Vaksinasi diyakini dapat mencegah penularan dan penyebaran Covid-19, yang nantinya menjadi penentu bagi pemerintah dalam mengambil langkah selanjutnya. Berdasarkan data WHO, dari bulan Januari sampai Maret 2021 tercatat sudah lebih dari 6 juta dosis vaksin telah diberikan kepada warga negara Indonesia. Akan tetapi jumlah tersebut masih sangat jauh dari total warga negara Indonesia, untuk itu sosialisasi dan penyebaran informasi tentang pentingnya vaksin Covid-19 perlu terus disebar (Widjaja, 2021).

Beberapa negara di dunia telah berhasil mengurangi tingkat penyebaran infeksi Covid-19 mereka lebih awal, sementara negara-negara yang lainnya, termasuk Indonesia masih kewalahan. Hal ini dipengaruhi oleh efektivitas respons yang bergantung pada kecepatan dan skala intervensi pemerintah dan bagaimana masyarakat menerima, memahami, dan bertindak berdasarkan informasi yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga lain (Hyland-Wood, dkk, 2021). Berbagai isu berkembang dengan tuduhan, tanggapan, pendapat, pemberitaan yang tidak jelas dasar ilmiahnya, hal ini terjadi sebagai bukti masyarakat menjadi panik dalam menghadapi penyebaran Covid-19. Kepanikan ini sangat dirasakan oleh masyarakat di Indonesia bahkan institusi pemerintah pun mengalami hal yang sama (Marzuki, dkk, 2021).

Kepanikan ini terjadi karena banyaknya pemberitaan yang simpang siur berkaitan dengan Covid-19. Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mengatakan “...infodemic... spreads faster and more easily than this virus”. Tidak hanya berjuang menangani virus itu sendiri, namun juga melawan atau mengatasi *infodemic* wabah Covid-19. Situasi ini diperparah dengan

ketidakmampuan pemerintah sebagai otoritas yang berwenang untuk menyediakan informasi yang akurat dan dapat menjadi pegangan masyarakat luas (Poppy S. Winanti, 2020). Ketidakterbukaan pemerintah atas data persebaran ikut menyebabkan kepanikan dan kesimpangsiuran informasi di tengah masyarakat (Kumala, 2020). Hal ini mencerminkan persoalan krusial yang dihadapi pemerintah dan masyarakat dalam penanganan Covid-19 melalui program vaksinasi dari pemerintah (Poppy S. Winanti, 2020).

Berdasarkan hasil survei penelitian dan pengembangan (litbang) Kompas, hanya 7,2% dari masyarakat Sumatera Barat yang bersedia untuk divaksin tanpa syarat. Sementara lebih dari 20,4% publik secara gamblang menolak untuk divaksin sama sekali. Jika dibandingkan, secara nasional hanya 5,2% masyarakat yang menolak divaksin Covid-19. (Rangga Eka Sakti, 2021). Seperti yang terlihat pada gambar 1. berikut ini.



**Gambar 1. Penerimaan Vaksin di Sumatera Barat.**

Sumber: [www.kompas.id](http://www.kompas.id)

Hasil survei dari litbang Kompas juga memperlihatkan penolakan vaksinasi masyarakat di Sumatera Barat disebabkan masyarakat cenderung tidak percaya dan tidak tahu tentang kebenaran informasi vaksin Covid-19. Dari yang menolak, sebanyak 22,8% menyatakan tidak tahu tentang vaksinasi dan 38,4% menyatakan tidak percaya tentang manfaat vaksinasi (Rangga Eka Sakti, 2021), seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.



**Gambar 2. Kepercayaan Masyarakat Terhadap Covid-19 dan Penerimaan Vaksin Sumatera Barat.**

Sumber: [www.kompas.id](http://www.kompas.id)

Sementara itu, persentase penolakan vaksinasi di Kota Padang sebesar 11,2% relative tinggi jika dibandingkan dengan presentase nasional, yaitu sebesar 5,2%, seperti yang diperlihatkan pada gambar 3. (Rangga Eka Sakti, 2021). Hal ini menuntut strategi komunikasi pemerintah dalam pemberian informasi yang valid kepada masyarakat terkait dengan vaksinasi Covid19. Sehingga, ketidakpercayaan dan ketidaktahuan masyarakat terhadap kebenaran vaksinasi Covid-19 bisa menurun.



**Gambar 3. Penerimaan Vaksin di Empat Wilayah Sumatera Barat (Bukittinggi, Padang, Payakumbuh dan solok)**

Sumber: [www.kompas.id](http://www.kompas.id)

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena sesuai dengan Permenkes RI nomor 84 tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. Mengingat penyebaran virus Covid-19 yang belum terkendali dengan baik, maka diperlukan strategi komunikasi Pemerintah Kota Padang (Diskominfo) dalam rangka menekan tingginya penolakan terhadap vaksinasi Covid-19. Diharapkan masyarakat nantinya mau mengikuti program vaksinasi, yang pada

akhirnya dapat mengurangi jumlah penderita yang terpapar/meninggal karena Covid-19.

Komunikasi pemerintah memiliki makna komunikasi yang diarahkan ke publik untuk tujuan politik, biasanya dilakukan oleh para politisi dan pejabat eksekutif, terkelola, dan bekerja untuk lembaga publik atas dasar persetujuan tidak langsung atau langsung dari warga negara untuk melaksanakan kemauannya. Komunikasi eksekutif ini memberikan informasi, menjelaskan, dan mempromosikan kebijakan publik (Dinkes Padang, 2021). Lebih lanjut, fungsi komunikasi pemerintahan dapat dikatakan sebagai upaya mewujudkan kesamaan makna antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara (Canel, 2016).

Strategi komunikasi pemerintah yang baik adalah komunikasi yang dilakukan secara parsimony, yaitu sederhana, mudah dimengerti, dan tidak berbelit-belit. Terry (1999) menyatakan bahwa kunci dari komunikasi yang efektif dikenal dengan 4C, yakni 1) kelengkapan (*completeness*), 2) kejelasan (*clarity*), 3) kepadatan (*conciseness*), dan 4) kebenaran (*correctness*) (Hasan, 2014).

Penelitian ini didukung dengan beberapa penelitian sebelumnya. Pertama, strategi komunikasi dalam Peraturan Gubernur No. 110 Tahun 2018 yang dilakukan oleh Disdukcapil Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengungkapkan bahwa sudah dilakukannya komunikasi, namun belum dijalankan dengan perencanaan yang sistematis. Bahkan, ada kekhawatiran jika masyarakat mengetahui isi Peraturan Gubernur tersebut, masyarakat akan menuntut pelayanan yang semakin prima, sedangkan masih adanya beberapa kendala di lapangan (Chou, 2020). Kedua, strategi komunikasi yang diterapkan oleh pemerintah kota Bekasi dalam program Bekasi Smart City mengungkapkan, strategi komunikasi pemerintah kota Bekasi menyukseskan program ialah

melalui sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan (1) Pihak pemerintah kepada tim pelaksana, (2) Tim pelaksana kepada dinas terkait, (3) Dinas terkait kepada masyarakat. Meski upaya melalui strategi komunikasi sudah dilakukan, namun implementasi program dinilai belum optimal. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman pihak terkait mengenai program Bekasi Smart City (Beliu, 2013).

Strategi komunikasi pemerintah merupakan salah satu faktor krusial yang menjadi penentu dalam menyukseskan program kebijakan pemerintah. Berdasarkan hal itu, penelitian ini mencoba membahas strategi komunikasi pemerintah Kota Padang (Diskominfo) dalam meminimalisir *infodemic* guna menekan besarnya penolakan masyarakat terhadap program vaksinasi Covid-19.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik. Kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Widodo, A, 2020).

Penarikan informan menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan informan menggunakan teknik ini dikarenakan tidak semua informan memiliki kriteria yang sesuai dengan penelitian. Pemilihan informan ditentukan dengan melihat status, peran, kedudukan dan jabatannya dalam strata sosial tertentu (Rachmiate, dkk, 2020). Adapun yang ditetapkan sebagai informan penelitian adalah pejabat struktural Dinas Kominfo Kota Padang, yaitu Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik, Kepala Seksi Pengolahan Opini dan Aspirasi Publik,

Kepala Seksi Pengolahan Media Komunikasi Publik, Kepala Seksi Penguatan Keterbukaan Informasi Publik dan Kepala Bidang Statistik dan Persandian Daerah.

Penelitian ini terdiri dari empat tahapan, yaitu; a) investigasi awal, b) desain, c) konstruksi, dan d) evaluasi dan revisi. Pada tahap investigasi awal dilakukan observasi, dilanjutkan survey lapangan dan diskusi bersama tim peneliti. Tahapan kedua, yaitu desain, dilakukan dengan mendesain format wawancara, dilanjutkan penyusunan daftar wawancara dan mendesain pertanyaan yang akan ditanyakan kepada informan. Tahapan ketiga, yaitu konstruksi. Pada tahapan ini dilakukan kegiatan pengumpulan data penelitian, kemudian data tersebut diklasifikasikan sesuai kebutuhan, untuk selanjutnya dilakukan pengolahan data. Tahap keempat adalah evaluasi dan revisi. Data diverifikasi dan diuji keabsahannya menggunakan triangulasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menjabarkan strategi komunikasi efektif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang melalui Diskominfo dalam meminimalisir *infodemic* Covid-19 menggunakan teori komunikasi efektif Terry (1999). Teori ini dikenal dengan 4C, yaitu 1) *Completeness* (kelengkapan), 2) *Clarity* (kejelasan), 3) *Conciseness* (kepadatan), dan 4) *Correctness* (kebenaran). Secara lebih rinci, dapat dijelaskan sebagai berikut; 1) *Completeness* (kelengkapan) artinya informasi yang dihasilkan harus memiliki kelengkapan yang baik, apabila informasi hanya sebagian-sebagian akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan atau penentuan tindakan secara keseluruhan (Chou, 2020). 2) *Clarity* (kejelasan) maksudnya komunikator (pemerintah) harus menyampaikan informasi secara jelas kepada komunikan (masyarakat), kejelasan informasi harus memenuhi tiga



hal yaitu, a) bahasa, b) istilah, dan c) nada dan intonasi (Beliu, 2013). 3) *Conciseness* (kepadatan) maksudnya informasi digolongkan dan disajikan dalam bentuk yang lebih ringkas, sehingga mampu mengantisipasi adanya informasi yang banyak dan membingungkan. 4) *Correctness* (kebenaran) (artinya kemampuan komunikator untuk memproduksi suatu pesan dengan tepat (Chou, 2020).

### 1. Kelengkapan (*Completeness*) Informasi Vaksinasi Covid-19 yang disampaikan Diskominfo Kota Padang

Bidang Informasi Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Padang memiliki tanggung jawab untuk melakukan diseminasi informasi kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan sudah memiliki kelengkapan yang cukup baik. Diskominfo berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Padang dalam penyampaian informasi vaksinasi Covid-19, tidak jarang informasi tersebut langsung disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kota Padang berupa video yang kemudian diposting pada laman *facebook* Diskominfo, seperti yang dapat dilihat pada gambar 4.



**Gambar 4. Diseminasi Informasi Vaksinasi Covid-19 oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang**

Diskominfo dalam menghimpun informasi yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat, selalu

melakukan rapat koordinasi dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait. Dalam rapat tersebut dihadirkan OPD yang berkompeten di bidangnya, seperti Dinas Kesehatan Kota Padang, dalam hal ini untuk menghimpun informasi vaksinasi Covid-19 dan perkembangan penularan Covid-19 di Kota Padang. Selanjutnya, juga secara aktif di media sosial *Facebook* membalas *chat* dari masyarakat berupa pertanyaan yang berhubungan dengan informasi *hoax* yang beredar. Aparatur Diskominfo dengan cepat merespon pertanyaan tersebut dengan memberikan informasi yang didapatkan dari sumber terpercaya.

Selain mengadakan rapat koordinasi dengan Dinas kesehatan Kota Padang dan membalas *chat* dari masyarakat di media sosial *Facebook*, Diskominfo juga memiliki aplikasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) lapor. Layanan ini tidak terbatas waktu, masyarakat dapat menyampaikan permasalahannya dan tidak perlu merasa ragu dalam menyampaikan aspirasi. Melalui aplikasi ini memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah Kota Padang melalui Diskominfo dengan masyarakat Kota Padang.

Komunikasi disini diharapkan dapat berfungsi sebagai sarana, agar masyarakat memberikan respon yang sewajarnya dalam mengeliminasi informasi-informasi *hoax* yang tidak bertanggung jawab. Karena disaat suasana penuh dengan ketidaknyamanan dan ketidakpastian akibat wabah yang melanda, komunikasi menjadi kunci sekaligus bagian dari solusi (Oktariani, 2020).

Penyediaan aplikasi SP4N lapor untuk masyarakat ini dimulai dengan pemberian bimbingan teknis terlebih dahulu kepada Diskominfo dan seluruh OPD lainnya di Kota Padang. Hal ini dilakukan dalam rangka meningkatkan *skill* aparatur negara dalam merespon pengaduan dan pertanyaan yang datang

dari masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang valid dan akurat dari sumber terpercaya di saat yang tepat.

Kelengkapan informasi yang disampaikan kepada masyarakat terus-menerus diupayakan oleh Diskominfo Kota Padang dalam rangka mendorong masyarakat Kota Padang untuk mau mengikuti vaksinasi Covid-19 dan tercapainya target vaksinasi sebesar 70% pada akhir tahun 2021. Salah satu contoh informasi yang disampaikan pada laman akun instagram Diskominfo adalah manfaat vaksin Covid-19, yakni; menurunkan angka kesakitan dan kematian karena Covid-19, meminimalkan dampak ekonomi dan sosial, serta mendorong terbentuknya “Herd Immunity” (kekebalan kelompok). Hal ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat guna meminimalisir keraguan dan *infodemic* yang beredar selama ini. Gambar 5. berikut ini memperlihatkan manfaat vaksin Covid-19 bagi masyarakat.



Gambar 5. Informasi Manfaat Vaksinasi Covid-19

Diskominfo selalu berusaha memenuhi kelengkapan informasi yang disampaikan kepada masyarakat, hal ini tentunya sangat krusial mengingat upaya meyakinkan masyarakat dan mengurangi keraguan dalam penerimaan vaksin Covid-19 bukanlah perkara yang mudah. Seperti yang dikemukakan oleh Puji Astuti bahwa penerimaan vaksin Covid-19 sudah menjadi polemik di berbagai negara. Tidak sedikit munculnya aksi penolakan terhadap vaksin Covid-19 karena dianggap tidak efektif. Salah satu faktor yang menyebabkan hal ini adalah kurangnya informasi yang diterima masyarakat dan sikap pemerintah yang cenderung tidak siap untuk mengedukasi masyarakat terkait vaksinasi yang menyebabkan timbulnya penolakan dari masyarakat (Puji Astuti, 2021).

Keragu-raguan dan kesalahan informasi vaksinasi Covid-19 menghadirkan hambatan besar untuk mencapai cakupan dan kekebalan komunitas. Pemerintah, tim kesehatan masyarakat dan kelompok advokasi harus siap untuk mengatasi keraguan dan membangun literasi vaksinasi Covid-19 sehingga masyarakat akan menerima imunisasi pada saat yang tepat (Lushington, 2020). Oleh sebab itu, koordinasi antara Diskominfo, Pemerintah Kota Padang, dan Dinas Kesehatan Kota Padang selalu dilakukan dalam rangka membangun literasi vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat kota Padang. Sehingga dengan tercapainya jumlah target vaksinasi Covid-19 pada akhir tahun 2021 ini, diharapkan dapat terciptanya “Herd Immunity” (kekebalan kelompok) yang mampu menekan penyebaran virus Covid-19.

## 2. Kejelasan (Clarity) Informasi Vaksinasi Covid-19 yang disampaikan Diskominfo Kota Padang.

Diskominfo Kota Padang sebagai komunikator harus menyampaikan

informasi secara jelas kepada masyarakat. Kejelasan ini memenuhi tiga hal, yaitu bahasa, istilah, dan nada atau intonasi. Diskominfo menyampaikan informasi selalu memperhatikan standar penulisan, seperti pemilihan kata-kata dan *outline* atau struktur penulisan. Salah satu bentuk penulisan informasi yang dibuat oleh Diskominfo adalah *flyer*.

*Flyer* ajakan vaksinasi Covid-19 yang dipublikasi diskominfo menggunakan bahasa yang sederhana, singkat dan jelas sehingga dapat dengan mudah dipahami masyarakat. Didalam *flyer* tersebut memberikan informasi tentang pelayanan vaksinasi Covid-19 gratis di Puskesmas dan menginfokan bahwa vaksinasi aman dan halal. Seperti Gambar 6. berikut ini yang memperlihatkan informasi mengenai ajakan untuk vaksin Covid-19 yang diposting pada laman facebook Diskominfo Kota Padang.



**Gambar 6. Informasi Keamanan dan Kehalalan Vaksinasi Covid-19**

Diskominfo dalam menyebarkan informasi berusaha menggunakan bahasa yang tidak rumit dan istilah yang mudah dipahami masyarakat. Memimalisir

istilah asing, namun jika memang diperlukan, maka istilah tersebut akan dipakai. Informasi biasanya memakai bahasa umum yang digunakan di masyarakat melalui koordinasi dengan Dinas terkait, seperti dinas kesehatan khusus untuk konteks kedokteran.

Selain menyebarkan *flyer* yang berisikan pesan singkat terkait informasi vaksinasi Covid-19, Diskominfo juga langsung terjun ke masyarakat dengan menggunakan MIK (Mobil Info Keliling) untuk dapat berinteraksi langsung ke tengah masyarakat dalam memberikan informasi. Masyarakat dapat bertanya secara *face to face* dengan aparat perihal informasi yang masih simpang siur berkenaan dengan vaksinasi Covid-19. Gambar 7. berikut ini memperlihatkan MIK Diskominfo.



**Gambar 7. Mobil Info Kota (MIK) Diskominfo Kota Padang**

MIK berkeliling ke seluruh wilayah di Kota Padang memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan mengajak masyarakat untuk tidak ragu dan bersedia divaksin. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kota Padang bersama Diskominfo dapat secara langsung terjun ke lapangan menyebarkan informasi dengan jelas, valid dan akurat. Sehingga keraguan masyarakat terhadap vaksin Covid-19 yang disebabkan *infodemic* dapat diminimalisir.

Disamping itu, Diskominfo juga memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Padang dengan menjelaskan bahwa vaksinasi Covid-19 tidak menjamin



seseorang tidak akan terkena Covid-19. Karena banyak informasi yang beredar di masyarakat, apabila sudah mendapatkan vaksin Covid-19, maka mereka tidak perlu lagi mematuhi protokol kesehatan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas). Informasi ini tentunya sangat menyesatkan dan perlu diklarifikasi oleh Diskominfo, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman yang lebih besar di tengah masyarakat nantinya.

Dalam rangka menepis informasi-informasi *hoax* yang semakin berkembang di masyarakat, Diskominfo membuat informasi dalam bentuk *flyer* yang memuat penjelasan terkait kebenaran vaksinasi Covid-19. Informasi tersebut dikemas dalam bentuk *flyer* dan kemudian dibagikan pada media sosial (*facebook*) dan instagram resmi Diskominfo. Saat ini internet, termasuk media sosial menjadi referensi utama untuk berita dan informasi. Dikatakan bahwa sembilan dari sepuluh pengguna internet memilih mencari informasi melalui sosial media, dan 80 persen dari pengguna internet di Indonesia memanfaatkan situs *facebook* untuk mencari informasi (Widjaja, 2021).

Salah satu informasi yang dibagikan oleh Diskominfo adalah tidak adanya jaminan 100% bagi yang sudah divaksin untuk tidak terkena virus Covid-19 kedepannya. Namun, dengan adanya vaksin ini mampu membentuk antibodi didalam tubuh dan mengurangi risiko tertularnya virus Covid-19. Lebih lanjut, Diskominfo juga menginformasikan bagaimana virus ini bisa bermutasi dari hari ke hari. seperti yang dapat dilihat pada gambar 8.



**Gambar 8. Vaksin Tidak Menjamin Kebal Terhadap Virus Covid-19**

Komunikasi yang jelas dan konsisten oleh pejabat pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kota Padang sangat penting untuk dilakukan. Tujuannya untuk membangun kepercayaan publik terhadap program vaksin, termasuk didalamnya menjelaskan cara kerja vaksin, serta cara mengembangkannya, dari perekrutan hingga persetujuan peraturan berdasarkan keamanan dan kemanjuran. Kampanye yang efektif juga harus dilakukan, bertujuan untuk menjelaskan dengan hati-hati tingkat keefektifan vaksin, waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan (dengan berbagai dosis, jika diperlukan) dan pentingnya cakupan seluruh populasi untuk mencapai kekebalan komunitas (Macartney, 2020).

Kejelasan informasi yang disebarluaskan kepada masyarakat merupakan hal yang sangat krusial, mengingat apabila terjadi kesalahan dalam pemahaman di lapangan akan berdampak pada ketidakpercayaan/penolakan vaksinasi Covid-19 itu sendiri. Pastinya hal ini menjadi pertimbangan



oleh Diskominfo untuk selalu berhati-hati dalam menyiapkan setiap konten informasi yang dibuat. Keberadaan tim kecil yang dibentuk di internal Diskominfo memberi kemudahan untuk mengevaluasi kembali semua informasi yang telah dibuat sebelum nantinya dipublikasikan ke khalayak/masyarakat.

## 2. Kepadatan (Conciseness) Informasi Vaksinasi Covid-19 yang disampaikan Diskominfo Kota Padang

Kepadatan informasi memiliki makna bahwa informasi digolongkan dan disajikan dalam bentuk yang lebih ringkas, sehingga mampu mengantisipasi adanya informasi yang banyak dan membingungkan. Informasi mengenai vaksinasi Covid-19 disampaikan dengan kalimat yang singkat, padat dan tidak bertele-tele, seperti kalimat berikut ini: “Vaksinasi harus dilakukan agar kita memiliki ketahanan tubuh menghadapi Covid-19, ayo vaksin”. Pada pesan ini, Diskominfo ingin menyampaikan kepada masyarakat Kota Padang untuk mau divaksin, agar dapat meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga mampu mengurangi risiko terjangkit Covid-19. Sebagai contoh, berikut ini postingan Diskominfo Kota Padang pada laman akun instagramnya yang memperlihatkan salah seorang masyarakat Kota Padang yang sedang divaksin pada gambar 9.



**Gambar 9. Kegiatan Vaksinasi Covid-19 di Kota Padang**

Berdasarkan informasi yang diposting ini, terlihat bahwa Diskominfo Kota Padang mengemas informasi tentang vaksinasi Covid-19 dengan ringkas dan sederhana. Kemudian, juga menghindari pemakaian kata-kata asing dan multitafsir. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat tidak salah menafsirkan informasi yang diterimanya. Namun, apabila informasi yang disajikan mengharuskan untuk memuat istilah asing, biasanya Diskominfo Kota Padang selalu menyertakan penjelasannya setelah penulisan kata asing tersebut dengan menuliskan penjelasan dalam bahasa Indonesia secara lebih rinci didalam kurung.

Selanjutnya, Diskominfo Kota Padang juga aktif memberikan informasi penyediaan pelayanan vaksin Covid-19 yang ada di Puskesmas Kota Padang. Seperti pada gambar 10. berikut ini, yang diposting pada akun resmi instagram Diskominfo.



**Gambar 10. Pelayanan Vaksinasi di salah satu Puskesmas Kota Padang**

Pada postingan ini, Diskominfo menghimbau masyarakat Kota Padang untuk mendaftarkan orang tua untuk mengikuti vaksin Covid-19 dalam rangka mencegah penyebaran virus Covid-19. Melalui instagram ini, diharapkan masyarakat dapat dengan cepat menerima informasi terbaru terkait vaksin Covid-19 yang disebar oleh Diskominfo.

Instagram adalah suatu aplikasi yang mempunyai item-item untuk dapat mengunggah foto/video yang dipublikasikan di sosial media yang bermanfaat sebagai media informasi (Maisya, 2021). Atmoko (2012) juga mengungkapkan bahwa instagram merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk berbagi foto dan video yang memungkinkan pengguna mengambil foto, mengambil video, menerapkan *filter* digital, dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial, termasuk milik instagram sendiri. Instagram banyak digunakan karena kemudahan dan kecepatannya

dalam berbagi foto maupun video (Marta, 2021).

Diseminasi informasi yang dilakukan oleh Diskominfo melalui media instagram ini, diharapkan mampu menciptakan interaksi yang baik dengan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk menjalin komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah tangga, di tempat pekerjaan, maupun dalam masyarakat atau dimana saja berada. Semua manusia pasti terlibat dalam komunikasi. Peranan komunikasi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu, kelompok, maupun dalam organisasi (Nur, 2020).

Instagram sebagai salah satu media komunikasi yang cukup banyak digunakan oleh masyarakat saat ini, berperan penting dalam segala aspek yang terjadi ketika manusia berinteraksi. Salah satunya ditunjukkan dalam proses penyebaran informasi kesehatan (vaksin Covid-19). Pada konteks ini dapat dikatakan sebagai media komunikasi terapeutik yaitu, semua sarana/ upaya yang digunakan untuk menyangkan adanya pesan atau informasi yang diberikan oleh komunikator, dengan perantara melalui media cetak, media elektronik dan media *online*, agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat. Pada akhirnya diharapkan adanya perubahan perilaku masyarakat ke arah positif terhadap kesehatan (Notoatmodjo, 2010).

Perubahan perilaku kesehatan yang diharapkan adalah timbulnya kesadaran dari masyarakat untuk divaksin tanpa paksaan dari siapa pun. Terwujudnya kesadaran secara kolektif akan pentingnya vaksin Covid-19 merupakan tujuan dari komunikasi pemerintah dalam menyukseskan target vaksin Covid-19 sebesar 70% di akhir tahun 2021 ini.

### 3. Kebenaran (Correctness) Informasi Vaksinasi Covid-19 yang disampaikan Diskominfo Kota Padang

Untuk mengecek kebenaran suatu informasi sebelum didiseminasikan kepada masyarakat, Diskominfo melakukan tiga tahapan. Pertama, melakukan *crosscheck* terhadap dinas terkait; kedua, mensinkronisasikan dengan data terbaru; dan ketiga, memfilter informasi melalui komunikasi dengan Dinas Kesehatan Kota Padang tentang bahasa yang akan disampaikan kepada masyarakat. Selain itu, menghadirkan akademisi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Unand untuk mengedukasi masyarakat tentang keamanan covid-19. Berikut gambar 11. memperlihatkan kegiatan FKM Unand dalam sosialisasi vaksinasi Covid-19.



**Gambar 11. Sosialisasi Vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Ambacang**

Diskominfo Kota Padang sangat gencar memberikan informasi terkait dengan vaksinasi Covid-19, hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan penerimaan masyarakat untuk mau divaksin dan meminimalisir *infodemic* yang beredar di masyarakat. Dalam pemberian informasi vaksinasi Covid-19, Diskominfo menggandeng dinas atau ahli yang kompeten di bidang kesehatan. Seperti, Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Andalas dan Kepala

Puskesmas Ambacang yang berkolaborasi dalam kegiatan pengabdian masyarakat (pengabmas) memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keamanan vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Ambacang.

Pada kegiatan ini disampaikan bahwa vaksin merupakan langkah jitu agar masyarakat terhindar dari virus Covid-19. Vaksinasi adalah pemberian vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan (Puji, 2021). Melalui vaksin inilah daya tahan tubuh masyarakat meningkat. Bagi masyarakat yang sudah melakukan vaksin, apabila terpapar virus Covid-19, serangan virus tersebut tidak sekuat bagi mereka yang belum divaksin. Selain itu, Defriman (Dosen FKM Unand) juga menghimbau masyarakat yang hadir untuk tidak percaya dengan berita-berita hoax tentang vaksin Covid-19 dan mengajak masyarakat pada kegiatan tersebut menjadi penggerak dalam sosialisasi vaksin Covid-19, agar tidak ada lagi masyarakat yang ragu untuk divaksin.

Selain dari sosialisasi informasi keamanan vaksinasi covid-19 yang dilakukan oleh sivitas akademik (Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Andalas) dan Kepala Puskesmas Ambacang, Diskominfo disetiap kesempatan juga selalu berupaya menyebarkan informasi-informasi akurat dan terpercaya dalam meminimalisir *infodemic* Covid-19 yang beredar di masyarakat. Seperti salah satu postingan informasi vaksin Covid-19 di akun resmi instagram Diskominfo yang dapat dilihat pada gambar 11. berikut ini.





**Gambar 12. Penjelasan Berita Hoax Tentang Bahaya Donor Darah dari Orang Yang Sudah Divaksin Covid-19**

Gambar sebelah kiri pada postingan ini menginformasikan berita yang beredar pada laman Facebook, bahwa donor darah dari seseorang yang telah diberi vaksin Covid-19 bisa berbahaya. Karena ribuan orang telah meninggal akibat disuntik vaksin, sehingga secara tidak langsung dapat mempengaruhi orang yang menerima donor darah dari mereka. Berita ini tentunya tidak benar. Oleh karena itu, pada gambar sebelah kanan, diberikan penjelasan terhadap kebenaran berita tersebut yang menerangkan bahwa klaim darah dari pendonor yang sudah divaksin Covid-19 tidak benar. Penggunaan darah dari pendonor yang sudah divaksin Covid-19 sama seperti terapi plasma konvalense, sehingga membentuk antibodi terhadap Covid-19. Normalnya, tidak ada waktu penanguhan bagi pendonor darah yang divaksinasi dengan vaksin Covid-19 yang tidak aktif atau berbasis RNA produksi AstraZeneca, Janssen/ J&J, Moderna, Novavax atau Pfizer. Informasi ini langsung disampaikan oleh juru bicara vaksin Covid-19 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dr. Siti Nadia Tarmizi.

Banjir informasi di media sosial menyebabkan masyarakat pengguna media sosial ragu untuk menentukan

informasi yang disampaikan itu fakta atau hoaks. Informasi fakta memberikan dampak yang positif kepada masyarakat sedangkan pemberitaan bohong atau palsu (hoax) menyebar sangat cepat terutama di media online yang memberikan dampak buruk/ negatif. Lebih jauh lagi, informasi palsu ini menjadi bagian dari konflik sehingga masing-masing mengklaim informasi yang disampaikan oleh kelompoknya adalah yang benar sedangkan lawannya menyampaikan informasi palsu (Sinar, 2021). Komunikasi publik yang efektif melalui koordinasi pihak-pihak terkait diharapkan mampu mengimbangi beredarnya informasi palsu, disinformasi, dan isu yang salah terkait suatu hal. Untuk meminimalisir terjadinya hal tersebut maka hal yang perlu dilakukan adalah dengan mempersingkat tahap-tahap dari proses komunikasi (Dewi, 2021).

## KESIMPULAN

Vaksinasi sangat penting untuk dilakukan karena dirasa mampu menjadi faktor penentu yang memungkinkan masyarakat untuk dapat kembali ke rutinitas normalnya setelah pandemi berakhir. Selanjutnya, informasi mengenai vaksinasi harus secara terus-menerus disosialisasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin Covid-19. Secara keseluruhan, strategi komunikasi Pemerintah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang (Diskominfo) dalam meminimalisir *infodemic* vaksinasi Covid-19 dapat dikatakan cukup baik.

Lebih rinci, dapat disimpulkan sebagai berikut, dalam hal kelengkapan (*Completeness*) informasi yang disampaikan, dapat dikatakan cukup lengkap. Hal ini dibuktikan dengan adanya koordinasi yang terbangun antara Diskominfo dan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang dalam menyusun



informasi vaksinasi Covid-19 sebelum disebarkan kepada masyarakat. Dilihat dari aspek kejelasan (*Clarity*) informasi yang *disharing* kepada masyarakat, dapat dikatakan bahwa penyampaian informasi sudah cukup jelas. Hal ini terlihat dari penggunaan bahasa pada informasi yang disampaikan. Diskominfo Kota Padang memilih menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Dari sudut pandang kepadatan (*Consiseness*) informasi yang disampaikan, Diskominfo Kota Padang mengemas informasi vaksinasi Covid-19 dengan cukup ringkas, singkat dan tidak bertele-tele. Sehingga masyarakat Kota Padang yang menerima informasi tersebut dapat memahami dengan baik pesan yang disampaikan Diskominfo. Berkaitan dengan kebenaran (*Correctness*) informasi yang disampaikan Diskominfo, informasi yang disebarkan kepada masyarakat Kota Padang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh Diskominfo Kota Padang, karena informasi yang dihasilkan sudah melalui beberapa tahapan pengecekan sebelum akhirnya dipublikasikan kepada publik.

Namun, ada beberapa hal yang memerlukan perhatian khusus, terutama informasi tentang keamanan dan kehalalan vaksin Covid-19. Diskominfo Kota Padang dinilai belum optimal mensosialisasikan hal tersebut. Untuk tercapainya target vaksinasi Covid-19 Kota Padang sebesar 70% di akhir tahun 2021 ini, maka Pemerintah Kota Padang melalui Diskominfo memerlukan strategi komunikasi yang tepat untuk menjawab keraguan masyarakat dan meyakinkan masyarakat tentang vaksin Covid-19. Dalam hal ini, Diskominfo Kota Padang dapat mengupayakan penglibatan Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumbar secara bersama-sama dalam diseminasi informasi mengenai keamanan dan kehalalan vaksin covid-19. Disamping itu, perlunya pengoptimalisasian operasional Mobil Info Kota (MIK) dalam menangkal

informasi-informasi negatif yang beredar di tengah-tengah masyarakat Kota Padang tentang vaksinasi Covid-19.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Padang yang telah membiayai penelitian ini dengan nomor kontrak penelitian: 663/UN35.13/LT/2021.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Padang yang telah membiayai penelitian ini dengan nomor kontrak penelitian: 663/UN35.13/LT/2021.

#### DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Beliu, Junus Jeschial. (2013). Pengaruh Komunikasi Organisasi Terhadap Pencitraan Organisasi Publik (Studi Tentang Pencitraan Mahasiswa Terhadap Lembaga Publik UPJJ UT Kupang). Master Thesis, Universitas Terbuka. Diakses dari [http://repository.ut.ac.id/6263/1/4\\_1021.pdf](http://repository.ut.ac.id/6263/1/4_1021.pdf)
- Canel, M. J., & Sanders, K. B. (2016). Government Communication. The International Encyclopedia of Political Communication, 1–8. doi:10.1002/9781118541555.wbiepc190.
- Chou, W.-Y. S., & Budenz, A. (2020). *Considering Emotion in COVID-19 Vaccine Communication: Addressing Vaccine Hesitancy and Fostering Vaccine Confidence*. *Health Communication*, 1–5. doi:10.1080/10410236.2020.1838096
- Dewi, S. A. E. (2021). Komunikasi Publik Terkait Vaksinasi Covid 19. *Health*

- Care: *Jurnal Kesehatan*, 10(1), 162-167.
- Dinkes Padang. 2021. Cakupan Vaksinasi Covid 19 Kota Padang, Update Tanggal 10 Maret 2021. <https://dinkes.padang.go.id/cakupan-vaksinasi-covid-19-kota-padang-update-tanggal-10-maret-2021>, diakses 11 Maret 2021, pukul 08.32 WIB.
- Diskominfo Kota Padang. 2021.
- Hasan, Erliana. 2014. Komunikasi Pemerintahan. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Hyland-Wood, B., Gardner, J., Leask, J., & Ecker, U. K. (2021). Toward effective government communication strategies in the era of COVID-19. *Humanities and Social Sciences Communications*, 8(1), 1-11.
- Kumala, D. A. R. (2020). Manajemen Komunikasi Pemerintah Pusat Dalam Menangani Covid-19. *COMMUNICARE*, 1(2).
- Lushington, Gerald H. 2020. "Perspective on the COVID-19 Coronavirus Outbreak". *Combinatorial Chemistry & High Throughput Screening* 23 (2): 90-91.
- Macartney, Kristine, Helen E. Quinn, Alexis J. Pillsbury, Archana Koirala, Lucy Deng, Noni Winkler, Anthea L. Katelaris, et al. 2020. –Transmission of SARS-CoV-2 in Australian Educational Settings: A Prospective Cohort Study. || *The Lancet Child and Adolescent Health* 4 (11): 807-16.
- Maisya, S. R., & Putri, K. Y. S. (2021). Konstruksi Makna Postingan Instagram@ Najwa Shihab Dalam Membangun Citra Diri (Analisis Semiotika Ferdinand De Saussure). *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 12(01), 75-87.
- Marta, S., Roem, E. R., & Sarmiati, S. (2021). Strategi Komunikasi Komunitas Padang Heritage Di Era
- 4.0. *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 12(01), 62-74.
- Marzuki, I., Bachtar, E., Zuhriyatun, F., Purba, A. M. V., Kurniasih, H., Purba, D. H., ... & Airlangga, E. (2021). *COVID-19: Seribu Satu Wajah*. Yayasan Kita Menulis.
- Notoatmodjo, Soekidjo. (2010). Promosi kesehatan dan Perilaku Kesehatan. Jakarta: Rineka cipta
- Nur, E. (2020). Analisis bentuk komunikasi masyarakat dalam menyampaikan informasi social distancing terhadap penanggulangan virus corona di Kabupaten Gowa. *Pangadereng*, 6(1), 109-118.
- Oktariani, R., & Wuryanta, A. E. W. (2020). Komunikasi Pemerintah Melalui Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kepada Publik. *Expose: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(2), 113-123.
- Poppy S. Winanti dan Wawan Mas'udi. 2020. Problem infodemic dalam merespon covid-19. <https://fisipol.ugm.ac.id/wp-content/uploads/sites/1056/2020/04/Policy-Brief-Problem-Infodemic-dalam-Merespon-Pandemi-COVID-19.pdf>, diakses 5 Maret 2021, pukul 21.33 WIB
- Puji Astuti, Nining. 2021. Persepsi Masyarakat Terhadap Penerimaan Vaksinasi Covid-19: Literature Review. *Jurnal Keperawatan*, 13(2), 569-580.
- Puji, L. K. R., Kasumawati, F., Ratnaningtyas, T. O., Ilmi, A. F., Sucipto, S., Bahri, S., ... & Mandira, T. M. (2021). Waspada Hoax Vaksin Covid-19 (Fakta Dan Mitos). *JAM: Jurnal Abdi Masyarakat*, 2(2), 71-76.
- Rachmiatie, A., Fitria, R., Suryadi, K., & Ceha, R. (2020). Strategi Komunikasi Pariwisata Halal Studi Kasus Implementasi Halal Hotel di Indonesia dan Thailand. *Amwaluna:*

*Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 56-74.

- Rangga Eka Sakti. 2021. Mencermati Resistensi Vaksinasi di Sumatera Barat.  
<https://www.kompas.id/baca/riset/2021/03/01/mencermati-resistensi-vaksinasi-di-sumatera-barat/> diakses 5 Maret 2021, pukul 23.15 WIB.
- Sinar, T. S., Lubis, S., & Zein, T. Analisis Pelatihan Penyaringan Berita Di Media Sosial Tentang Pandemi Covid-19 Dan Vaksinasi Kepada Masyarakat Desa Rantau Panjang.
- Widjaja, V., & Widodo, N. M. (2021). Pengaruh Teknologi Internet terhadap Pengetahuan Masyarakat Jakarta Seputar Informasi Vaksinasi Covid-19. *TEMATIK-Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 8(1), 1-13.
- Widodo, A., & Permatasari, D. A. (2020). Strategi Komunikasi Pemerintah Kota Bekasi Dalam Program Bekasi Smart City. *ETTISAL: Journal of Communication*, 5(1), 79-89.